

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap kinerja keuangan pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum dan sesudah otonomi daerah dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio aktivitas yang terdiri dari atas rasio belanja rutin terhadap APBD dan rasio belanja pembangunan terhadap APBD dan rasio pertumbuhan yang terdiri atas rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja rutin, rasio pertumbuhan belanja pembangunan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kemandirian pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum otonomi tidak terdapat perbedaan dengan sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur belum bisa menggali pendapatan asli daerahnya untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur masih tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
2. Tingkat belanja rutin terhadap APBD pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum otonomi daerah terdapat perbedaan dengan sesudah otonomi daerah. Keadaan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Jawa Timur dalam

mengalokasikan dananya untuk belanja rutin sebelum otonomi lebih baik daripada setelah otonomi daerah.

3. Tingkat belanja pembangunan terhadap APBD pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum otonomi tidak terdapat perbedaan dengan sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat masih diprioritaskan untuk belanja rutin.
4. Tingkat pertumbuhan PAD pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum otonomi tidak terdapat perbedaan dengan sesudah otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah masih tergantung pada dana perimbangan dan belum bisa menggali PAD sendiri.
5. Tingkat pertumbuhan pendapatan pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum otonomi terdapat perbedaan dengan sesudah otonomi daerah. Hal ini menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat sesudah otonomi daerah masih sangat besar.
6. Tingkat pertumbuhan belanja rutin pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum otonomi terdapat perbedaan dengan sesudah otonomi daerah. Ini dikarenakan alokasi untuk belanja rutin naik dikarenakan bantuan dari pemerintah pusat juga naik.
7. Tingkat pertumbuhan belanja pembangunan pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur sebelum otonomi terdapat perbedaan dengan sesudah otonomi daerah. Keadaan ini menunjukkan alokasi untuk

belanja pembangunan sangat kecil karena alokasi untuk belanja rutin masih di prioritaskan.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan, adapun keterbatasan tersebut antara lain :

1. Periode pengamatan data yang diambil masih kurang dengan menambah periode pengamatan akan memberikan kesimpulan lain.
2. Rasio untuk mengukur tingkat efektivitas PAD dan efisiensi PAD tidak dapat dihitung karena tidak ada data yang tersedia di propinsi dan keterbatasan waktu dan biaya.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian lain agar memperkuat pengujian, misalnya rasio efektivitas, rasio efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004 . *Akuntansi keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Andi Kristiawan. 2007. "Analisis Rasio Keuangan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Madiun Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Periode Pengamatan 1997-2005)" *Skripsi program strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun* (tidak dipublikasikan).
- Bambang Haryadi. 2002 . "Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten/kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Timur)". *Simposium Nasional Akuntansi V*.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II. 1998/1999/2000 dan 2002/2003/2004*.
- Harry Waluya. 2001. "Analisis Rasio PAD/APBD Terhadap Kebijakan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Agustus*
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi 13.
- Indra Bastian, 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Cetakan ke 2. Jakarta: Salemba Empat
- Johan Arifin. 2005. "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Fiskal Stress (Studi Terhadap Beberapa Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol.6,.No.2.
- Khoirunisak dan Ardi Hamzah. 2007. "Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Sebelum dan Sesudah Undang-undang No.17 Tahun 2003 : Studi Kasus APBN 2000-2006". *Makalah Simposium Riset Ekonomi III ISIEI Surabaya*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :Andi
- Mudrajad Kuncoro, 2001, *Metode Kuantitatif*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN: Yogyakarta.

- Nur Indriantoro. 1999. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta. BPEE
- Rahmat Tri Haryadi. 2005. "Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Evaluasi atas Kinerja Pemerintah Daerah". Artikel. *Media Akuntansi*. Tahun XII Edisi 45.
- Sohidin dan Ngadiman. 2004. "Analisa Rasio Keuangan APBD sebagai Evaluasi atas Kinerja Pemerintah Daerah (*Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah*)". *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol.2, No 2.
- Singgih Santoso. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Undang- Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang No.33.,Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*